

## Analisis Peran Kompetensi dan Profesionalisme Staf Bendahara dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan: Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire

Ni Kadek Wulandari<sup>1\*</sup>, Yoel Pasae<sup>2</sup>, Hendrik Gunadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

[nikadepasaribu92@gmail.com](mailto:nikadepasaribu92@gmail.com)<sup>1\*</sup>

\*Penulis korespondensi

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kompetensi dan profesionalisme staf bendahara dalam efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap bendahara serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta keterampilan dalam penggunaan aplikasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu dan akurasi pelaporan. Profesionalisme staf tercermin dari kedisiplinan, integritas, dan kepatuhan terhadap standar operasional, yang berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Kendati demikian, terdapat kendala berupa terbatasnya pelatihan, tingginya beban kerja, dan perubahan regulasi yang cepat tanpa sosialisasi memadai. Temuan ini menegaskan perlunya strategi pengembangan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan budaya profesionalisme untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis pada pengembangan manajemen keuangan publik sekaligus rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan sektor pendidikan.

**Kata kunci:** kompetensi, profesionalisme, staf bendahara, pengelolaan keuangan, efektivitas

***Abstract:** This study aims to analyze the role of competence and professionalism of treasury staff in the effectiveness of financial management at the Education Office of Nabire Regency. Employing a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving treasury staff and related stakeholders. The findings reveal that technical competence, regulatory knowledge, and the ability to operate financial applications significantly contribute to the timeliness and accuracy of financial reporting. Professionalism, reflected in discipline, integrity, and compliance with standard operating procedures, strengthens transparency and accountability in public fund management. However, several challenges remain, including limited training opportunities, heavy workloads, and rapid regulatory changes without adequate socialization. These results highlight the need for continuous capacity-building programs, competency certification, and the reinforcement of professionalism to enhance the effectiveness of regional financial management. The study contributes theoretically to the discourse on public financial management and provides practical recommendations for local governments in improving financial governance within the education sector.*

***Keywords:** competence, professionalism, treasury staff, financial management, effectiveness*

**PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintah daerah, pengelolaan keuangan yang efektif ditandai dengan akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan waktu dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Staf bendahara berperan strategis karena bertanggung jawab secara teknis maupun administratif dalam proses pencatatan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Kualitas kompetensi dan profesionalisme staf bendahara menjadi faktor penentu efektivitas tata kelola keuangan di sektor publik, khususnya di bidang pendidikan yang mengelola anggaran cukup besar dan kompleks (Yusuf & Hasan, 2021).

Fenomena yang muncul di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Nabire, menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Beberapa masalah yang kerap terjadi antara lain keterlambatan laporan, kesalahan pencatatan, lemahnya pemahaman regulasi, serta kurangnya pembinaan berkelanjutan terhadap staf bendahara (Asamil & Arif, 2024). Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2023) masih menemukan temuan terkait kelemahan administrasi, penggunaan dana yang tidak sesuai perencanaan, hingga pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara standar ideal pengelolaan keuangan dengan praktik di lapangan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, fenomena masalah pengelolaan keuangan di sektor pendidikan dapat ditunjukkan melalui Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Fenomena Masalah Pengelolaan Keuangan Publik di Daerah

Fenomena	Fakta Lapangan	Sumber
Keterlambatan pelaporan keuangan	32% pemerintah daerah mengalami keterlambatan penyampaian laporan tahun 2022	BPK RI (2023)
Rendahnya kompetensi teknis bendahara	Banyak bendahara tidak memiliki latar belakang akuntansi/keuangan, berdampak pada kesalahan administrasi	Asamil & Arif (2024)
Beban kerja ganda	Bendahara sering merangkap tugas non-keuangan sehingga kualitas laporan menurun	Cahyo, Ayu, & Azriya (2024)

Fenomena	Fakta Lapangan	Sumber
Minimnya pelatihan berkelanjutan	Hanya 40% bendahara yang mengikuti bimtek reguler dalam 3 tahun terakhir	Priambudi (2023)

Sumber: Dirangkum dari penelitian terdahulu (2025)

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi ketat mengenai tata kelola keuangan, faktor sumber daya manusia terutama terkait kompetensi dan profesionalisme masih menjadi titik lemah. Padahal, sektor pendidikan menuntut pengelolaan anggaran yang akurat dan transparan mengingat besarnya alokasi dana, termasuk Dana BOS, tunjangan guru, serta pembangunan sarana prasarana pendidikan.

**Urgensi Penelitian**

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme staf bendahara sebagai pilar utama efektivitas pengelolaan keuangan publik. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem keuangan hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh akar persoalan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kapasitas SDM dan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kompetensi staf bendahara dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire?
2. Bagaimana profesionalisme staf bendahara tercermin dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kompetensi dan profesionalisme staf bendahara terhadap efektivitas pengelolaan keuangan?

## TINJAUAN LITERATUR

### Kompetensi

Kompetensi didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu melaksanakan tugas secara efektif (Spencer & Spencer, 1993). Dalam konteks keuangan publik, kompetensi bendahara mencakup penguasaan regulasi, kemampuan teknis pencatatan dan pelaporan, serta keterampilan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah (Asamil & Arif, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi teknis memiliki hubungan signifikan dengan kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan ketepatan waktu pelaporan (Cahyo, Ayu, & Azriya, 2024).

Selain itu, kompetensi digital menjadi semakin penting seiring penerapan aplikasi keuangan berbasis teknologi, seperti SIPD dan SIMDA. Rendahnya literasi digital bendahara terbukti menjadi hambatan dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel (Siregar, 2025). Dengan demikian, penguatan kompetensi tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga keterampilan teknologi informasi.

### Profesionalisme

Profesionalisme dipahami sebagai sikap kerja yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap etika profesi (Hoy & Miskel, 2008). Dalam pengelolaan keuangan publik, profesionalisme ditunjukkan melalui kedisiplinan, transparansi, dan komitmen terhadap akuntabilitas (Yusuf & Hasan, 2021). Aparatur yang profesional cenderung memiliki komitmen tinggi terhadap standar kerja, menjaga integritas dalam penggunaan dana, serta konsisten menjalankan kode etik ASN.

Hasil penelitian Setyorini, Susilowati, Ramadhanti, dan Farida (2017) menunjukkan bahwa pelatihan teknis mampu meningkatkan profesionalisme aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pembinaan profesionalisme melalui pelatihan dan pengawasan berkelanjutan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.

### Efektivitas Pengelolaan Keuangan Publik

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik diartikan sebagai kemampuan sistem dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat, akuntabel, dan transparan (Gibson, Ivancevich, & Donnelly,

2009). Efektivitas ini dapat diukur dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan pelaporan, serta minimnya temuan audit (Andriani, 2020).

Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan keuangan publik sering terkendala oleh keterbatasan SDM, perubahan regulasi yang cepat, serta lemahnya sistem pengawasan internal (Priambudi, 2023). Studi terbaru menekankan bahwa integrasi kompetensi dan profesionalisme aparatur menjadi kunci dalam memperbaiki efektivitas tata kelola keuangan daerah, khususnya di sektor pendidikan yang memiliki beban anggaran besar (Asamil & Arif, 2024).

### Hubungan Kompetensi, Profesionalisme, dan Efektivitas

Secara teoretis, kompetensi dan profesionalisme memiliki hubungan langsung dengan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Aparatur yang kompeten tetapi tidak profesional berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang, sementara profesionalisme tanpa kompetensi teknis dapat menyebabkan kesalahan administratif. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya menjadi determinan utama keberhasilan tata kelola keuangan daerah (Cahyo et al., 2024; Siregar, 2025).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual mengenai peran kompetensi serta profesionalisme staf bendahara dalam efektivitas pengelolaan keuangan. Menurut Creswell dan Poth (2018), studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara komprehensif suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata melalui berbagai sumber data. Dengan desain ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai praktik pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Namun, penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling probabilitas, melainkan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Informan

utama terdiri dari tiga pihak, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Bendahara Umum, dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Ketiga informan dipilih karena memiliki peran sentral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai kompetensi dan profesionalisme bendahara.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut mengelola anggaran pendidikan yang besar, termasuk dana BOS, tunjangan guru, serta pembangunan sarana prasarana, sehingga representatif untuk melihat kompleksitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Penelitian dilaksanakan selama bulan Juni 2025, dengan mempertimbangkan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan mengenai kompetensi dan profesionalisme bendahara. Observasi langsung dilakukan untuk melihat praktik pengelolaan keuangan sehari-hari, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis berupa laporan realisasi anggaran, SOP, serta dokumen pendukung lainnya. Penggunaan multi-sumber data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis ini melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data lapangan (Braun & Clarke, 2019). Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga akhir penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta melakukan *member checking* dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan terkait. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan valid, reliabel, dan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengelolaan keuangan publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di wilayah kabupaten, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga menengah. Instansi ini mengelola anggaran yang besar, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Struktur pengelolaan keuangan terdiri dari bendahara umum, bendahara pembantu, serta Subbagian Keuangan. Dengan demikian, efektivitas kinerja bendahara menjadi aspek penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran dalam penggunaan dana publik.

### Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah tiga informan kunci yang dipilih berdasarkan peran strategis mereka dalam pengelolaan keuangan. Karakteristik responden ditampilkan dalam **Tabel 2** berikut:

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Jabatan	Peran Utama dalam Pengelolaan Keuangan
1	Dra. Dinna Pidjer, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan	Magister Manajemen	7 tahun	Penentu kebijakan & pengawas utama
2	Robert Mangape, S.Hut.	Bendahara Umum	Sarjana Kehutanan	5 tahun	Pengelola transaksi & laporan keuangan
3	Endang Patari, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan	Magister Manajemen	6 tahun	Koordinator administrasi & pelaporan

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Data di atas menunjukkan bahwa tidak semua bendahara berlatar belakang akuntansi/keuangan. Hal ini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi teknis, khususnya dalam memahami regulasi keuangan dan penggunaan aplikasi digital.

### Hasil Wawancara

Untuk memperkuat analisis, dilakukan wawancara mendalam dengan tiga informan

kunci. Ringkasan temuan wawancara disajikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Ringkasan Hasil Wawancara dengan Informan Kunci

Tema Penelitian	Informan 1 (Kepala Dinas)	Informan 2 (Bendahara Umum)	Informan 3 (Kasubbag Keuangan)
<b>Kompetensi Bendahara</b>	Kompetensi cukup baik, namun ada gap terkait regulasi terbaru dan aplikasi keuangan	Kompetensi bervariasi, beberapa masih butuh bimbingan teknis	Staf memahami tugas dasar, tetapi literasi digital belum merata
<b>Profesionalisme</b>	Profesional, disiplin, dan bertanggung jawab, meski masih perlu pembinaan	Sudah menunjukkan kedisiplinan, kepatuhan SOP, dan integritas	Sebagian besar disiplin dan akuntabel, tapi pembinaan rutin tetap diperlukan
<b>Faktor Pendukung</b>	Dukungan atasan, pelatihan terbatas namun bermanfaat	Fasilitas kerja, bimbingan pimpinan, kerja sama tim	SOP yang jelas, lingkungan kerja kondusif, dukungan pimpinan
<b>Hambatan Utama</b>	Minim pelatihan, beban kerja tinggi, perubahan regulasi cepat	Kurang pelatihan rutin, kendala aplikasi keuangan	Beban kerja ganda, keterbatasan SDM akuntansi, kendala teknis sistem

Sumber: Hasil wawancara (2025)

## Pembahasan

### Peran Kompetensi Staf Bendahara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis bendahara, seperti penguasaan regulasi keuangan, keterampilan pencatatan, dan penggunaan aplikasi keuangan, berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Kompetensi yang baik meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan akurasi administrasi, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa staf yang kompeten mampu menyusun laporan sesuai prosedur. Namun, masih ditemukan kesenjangan kompetensi akibat kurangnya latar belakang akuntansi dan keterbatasan pelatihan. Hal ini konsisten dengan penelitian Asamil dan Arif (2024) yang menemukan bahwa kompetensi

teknis bendahara sangat memengaruhi mutu laporan keuangan publik.

### Profesionalisme Staf Bendahara

Profesionalisme tercermin dari kedisiplinan, integritas, serta kepatuhan terhadap SOP dan kode etik ASN. Informan menyatakan bahwa bendahara sudah cukup profesional dalam menjalankan tugas, meskipun masih membutuhkan pembinaan rutin. Profesionalisme menjadi aspek kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dana publik. Temuan ini sejalan dengan Yusuf dan Hasan (2021) yang menekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.

### Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme bendahara meliputi dukungan pimpinan, fasilitas kerja, serta SOP yang jelas. Namun, hambatan yang signifikan mencakup kurangnya pelatihan berkelanjutan, beban kerja ganda, keterbatasan SDM dengan latar belakang akuntansi, serta perubahan regulasi tanpa sosialisasi memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi bendahara merupakan kebutuhan mendesak. Priambudi (2023) menegaskan bahwa kompetensi dan integritas bendahara terbukti berpengaruh positif terhadap tata kelola keuangan negara yang baik.

### Implikasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kompetensi dan profesionalisme staf bendahara terbukti menjadi faktor penentu dalam efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Tanpa penguatan pada kedua aspek ini, efektivitas pengelolaan keuangan sulit tercapai meskipun sistem dan regulasi sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi bendahara, serta pembinaan profesionalisme untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kompetensi dan profesionalisme staf bendahara terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis, termasuk pemahaman regulasi keuangan dan keterampilan dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah, berkontribusi signifikan terhadap ketepatan waktu dan akurasi pelaporan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi merupakan prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola keuangan publik yang efektif.

Profesionalisme staf bendahara tercermin dari kedisiplinan, integritas, dan kepatuhan terhadap standar operasional. Profesionalisme terbukti memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, kompetensi dan profesionalisme merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan tata kelola keuangan di sektor pendidikan.

Faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, SOP yang jelas, dan lingkungan kerja yang kondusif terbukti memperkuat penerapan kompetensi dan profesionalisme bendahara. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala berupa terbatasnya pelatihan berkelanjutan, beban kerja ganda, serta perubahan regulasi yang cepat tanpa sosialisasi memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di tingkat daerah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas bendahara melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan profesionalisme secara sistematis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam memediasi hubungan antara sistem regulasi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

## Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, fokus penelitian terbatas pada satu instansi, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, sehingga belum

mencerminkan kondisi di OPD lain atau daerah yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan jumlah sampel yang lebih besar, serta memperluas objek penelitian ke berbagai sektor pemerintahan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kompetensi, profesionalisme, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, T. (2020). *Pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan publik*. Jakarta: Prenada Media.
- Asamil, N. H., & Arif, F. (2024). Analisis kompetensi bendahara dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri. *Jurnal Operasional Manajemen (JURAMA)*, 2(1), 53–58.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2023). *Iktisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Cahyo, A. D., Ayu, M., & Azriya, N. (2024). Analisis pengaruh literasi manajemen keuangan dan kompetensi dalam pengelolaan keuangan Dinas PUPR Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 8(4), 385–391.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2009). *Organizations: Behavior, structure, processes* (Edisi Bahasa Indonesia). Jakarta: Erlangga.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2008). *Educational administration: Theory, research, and practice* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandil, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1),

- 138–147.  
<https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE.
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.  
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mangopo, R. M., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 8(1), 171–180.  
<https://doi.org/10.36778/jesy.v8i1.1887>
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58.  
<https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Priambudi, P. (2023). *Pengaruh kompetensi, integritas, dan motivasi kerja bendahara pengeluaran terhadap tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik (Studi pada Urusan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Mabes Polri)* [Disertasi, Universitas Mercu Buana Jakarta].
- Setyorini, C. T., Susilowati, D., Ramadhanti, W., & Farida, Y. N. (2017, September). Analisis efektivitas pelatihan keuangan desa: Upaya peningkatan profesionalisme aparatur desa. *Sustainable Competitive Advantage-7 (SCA-7) FEB UNSOED Purwokerto*, 20.
- Siregar, S. M. (2025). Peran bendahara pengeluaran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui sistem aplikasi keuangan pada Pengadilan Negeri Bangil. *Rashid: Journal of Economic*, 1(1), 38–46.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, R., & Hasan, A. (2021). Profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 115–127.